



WELFARE

JURNAL ILMU EKONOMI

VOLUME 5 NOMOR 2 (NOVEMBER 2024)

<http://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare>

ISSN 2723-2212 (MEDIA ONLINE)

ISSN 2723-2220 (MEDIA CETAK)

PENGARUH PAD, BELANJA MODAL, DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TERHADAP PENGELUARAN PEMERINTAH DI PROVINSI DKI JAKARTA

Dwilita Agmirsy^{a*}, Eva Sherlina Dewi^b, Agustina Anantalia Pamungkas^c, Yustirania Septiani^d

^{a,b,c,d} Universitas Tidar, Magelang, Jawa Tengah, Indonesia

*dwilita.agmirsy@students.untidar.ac.id

Diterima: September 2024 **Disetujui:** Oktober 2024 **Dipublikasikan:** November 2024

ABSTRACT

This study aims to analyze and evaluate the extent of the influence of Regional Original Revenue (PAD), Capital Expenditure, and Regional Financing Receipts on the Government Expenditure of Jakarta Province. The data used in this study is secondary time-series data covering the period from 2015 to 2022, sourced from One Data Jakarta Province. Data analysis was conducted using a quantitative approach through multiple linear regression model equations. The results of the study indicate that, simultaneously (F-test), PAD, capital expenditure, and regional financing receipts significantly influence the government expenditure of Jakarta Province. Partially, Regional Original Revenue (PAD) and Regional Expenditure have a positive and significant impact on the Government Expenditure of Jakarta Province. Meanwhile, Regional Financing Receipts have a negative and significant effect on the Government Expenditure of Jakarta Province. The implications of these findings suggest that the local government is expected to maximize regional expenditures that support efforts to enhance and strengthen the potential of PAD in DKI Jakarta Province.

Keywords: Regional Original Revenue, Capital Expenditure, Financing Revenue, Government Expenditure.

ABSTRAK

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis dan mengevaluasi sejauh mana pengaruh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Penerimaan Pembiayaan Daerah terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jakarta. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder *time series* rentang periode tahun 2015–2022 bersumber dari Satu Data Provinsi Jakarta. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kuantitatif melalui persamaan model regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan (uji F) PAD, belanja modal dan penerimaan pembiayaan daerah berpengaruh signifikan terhadap pengeluaran pemerintah Provinsi Daerah Jakarta. Secara parsial Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Daerah memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jakarta. Penerimaan Pembiayaan Daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jakarta. Implikasi dari hasil penelitian ini, pemerintah setempat diharapkan mampu memaksimalkan belanja daerah yang mendukung upaya peningkatan dan memperkuat potensi PAD Provinsi DKI Jakarta.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Penerimaan Pembiayaan, Pengeluaran Pemerintah.

I. PENDAHULUAN

Salah satu cara pemerintah untuk meregulasi perekonomian adalah melalui pengeluaran pemerintah (*Government Expenditure*). Pengeluaran pemerintah adalah kebijakan yang diambil melalui APBN tingkat nasional dan APBD, oleh pemerintah untuk mengatur perekonomian dengan menetapkan pendapatan dan pengeluaran setiap tahun untuk tingkat daerah. Tujuan utama dari kebijakan fiskal ini adalah mengendalikan biaya, volume produksi, dan produktivitas tenaga kerja serta mengarahkan sumber daya perekonomian (Sukirno, 2010).

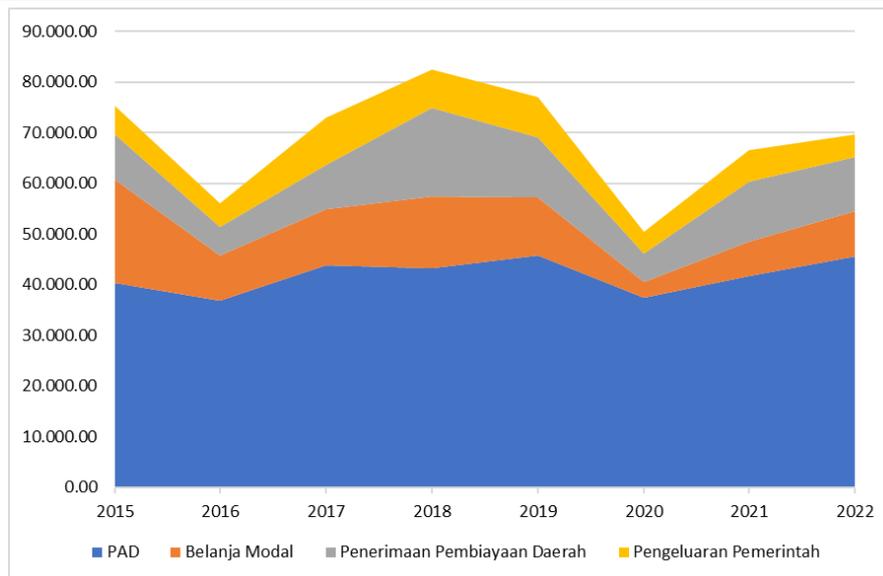
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat utama pemerintah daerah dalam merencanakan dan mengelola keuangan daerah. APBD terdiri dari dua komponen utama, yaitu pendapatan dan belanja. Pendapatan daerah berasal dari sumber-sumber seperti Pendapatan Asli Daerah (PAD), pendapatan transfer dari pemerintah pusat, serta penerimaan pembiayaan. Belanja daerah digunakan untuk mendanai berbagai program dan kegiatan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. APBD menjadi instrumen penting dalam pengelolaan ekonomi daerah, memastikan alokasi sumber daya yang efisien dan tepat sasaran.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan komponen penting dalam pengelolaan keuangan daerah yang mencerminkan kemampuan suatu daerah untuk membiayai kebutuhan pembangunan dan pelayanan publik. Sumber-sumber PAD dapat berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Secara umum, sumber PAD dalam negeri mencakup pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan pendapatan lain-lain yang sah. Pajak daerah, seperti pajak hotel, restoran, dan hiburan, menjadi salah satu penyumbang terbesar bagi PAD. Retribusi

daerah, yang mencakup biaya atas pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah, juga berperan signifikan. Selain itu, pendapatan dari pengelolaan aset daerah, seperti sewa tanah atau bangunan, serta pendapatan lain-lain yang sah, turut memperkuat kas daerah.

Di sisi lain, sumber PAD dari luar negeri sering kali diperoleh melalui hibah, pinjaman, atau kerja sama internasional. Hibah dari negara asing atau lembaga internasional dapat digunakan untuk proyek pembangunan tertentu, sedangkan pinjaman luar negeri biasanya diperlukan untuk proyek-proyek besar yang membutuhkan investasi jangka panjang. Kerja sama internasional juga membuka peluang pendapatan tambahan melalui proyek-proyek bersama yang dibiayai oleh mitra asing. Dengan diversifikasi sumber pendapatan ini, diharapkan daerah dapat meningkatkan kemandirian fiskal dan kapasitas finansialnya untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pemerintah Indonesia memainkan peran penting dalam mengelola sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran untuk memastikan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Sumber pendapatan tersebut mencakup berbagai sektor, sementara pengeluaran pemerintah dibagi menjadi beberapa ranah, termasuk ranah politik dan ekonomi. Dalam ranah politik, pengeluaran digunakan untuk mendukung kegiatan pemerintahan, seperti operasional lembaga-lembaga negara dan implementasi kebijakan publik. Sementara itu, dalam ranah ekonomi, pengeluaran pemerintah diarahkan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan layanan publik, dan stimulasi pertumbuhan ekonomi melalui berbagai program dan proyek. Pendapatan transfer adalah pendapatan yang diperoleh dari transfer dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penerimaan pembiayaan adalah penerimaan dari pembiayaan yang disalurkan oleh pemerintah pusat ke pemerintah daerah.



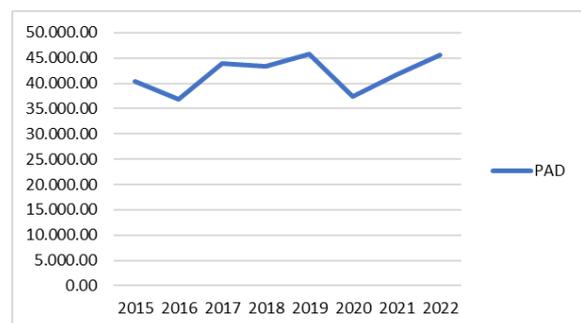
Gambar 1. Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jakarta
 Sumber: Satu Data Provinsi Jakarta, 2024

Berdasarkan gambar 1 diatas menunjukkan pengeluaran yang cenderung stabil dengan sedikit penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2015, pengeluaran pemerintah tercatat sebesar Rp 5.636,31 juta, dan pada tahun 2022, pengeluaran ini menurun menjadi Rp 4.526,63 juta. Penurunan ini mungkin berkaitan dengan pengetatan anggaran akibat pandemi yang membatasi banyak kegiatan pemerintah, meskipun sektor-sektor prioritas tetap berjalan. Perubahan dalam pengeluaran pemerintah ini mencerminkan efisiensi yang dicapai dalam manajemen anggaran serta perubahan prioritas program pemerintah daerah.

Dalam periode 2015-2022, Provinsi Jakarta menghadapi sejumlah tantangan signifikan terkait pengeluaran pemerintah. Salah satu masalah utama adalah peningkatan pengeluaran untuk infrastruktur, yang sering kali tidak sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Biaya sosial dan subsidi juga mengalami lonjakan, terutama untuk mendukung masyarakat berpendapatan rendah dan program bantuan sosial, yang memberikan tekanan tambahan pada anggaran daerah. Selain itu, beberapa proyek pembangunan terhambat atau tertunda, menyebabkan pembengkakan biaya dan sering kali berakhir dengan *overbudget*. Korupsi juga menjadi masalah yang merugikan anggaran pemerintah, mengurangi efisiensi penggunaan dana

publik. Tantangan kebijakan fiskal juga muncul, di mana pemerintah kesulitan menyeimbangkan penerimaan dan belanja dalam situasi perekonomian yang fluktuatif.

Di samping itu, pengeluaran untuk sektor pendidikan dan kesehatan meningkat, terutama pada masa pandemi Covid-19, di mana anggaran pemerintah terpaksa dialokasikan untuk penanggulangan wabah, pembelian alat kesehatan, serta pemberian bantuan sosial dan pemulihan ekonomi yang menyebabkan lonjakan pengeluaran. Semua faktor ini berkontribusi pada ketidakseimbangan dan kesulitan dalam pengelolaan anggaran daerah.

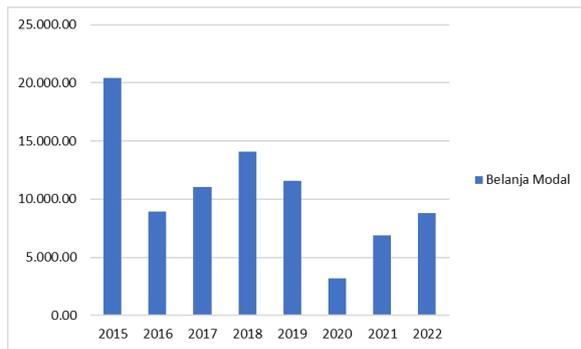


Gambar 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jakarta
 Sumber: Satu Data Provinsi Jakarta, 2024

Berdasarkan gambar 2 di atas menunjukkan fluktuasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Jakarta antara 2015 hingga 2022 menunjukkan penurunan yang signifikan pada 2016, diikuti dengan peningkatan yang tajam hingga 2019.

Namun, pada 2020, dampak pandemi COVID-19 menyebabkan penurunan tajam dalam PAD. Meskipun ada pemulihan pada 2021 dan 2022, PAD belum sepenuhnya kembali ke level tertinggi yang tercatat sebelum pandemi, mencerminkan tantangan ekonomi yang dihadapi Jakarta dan upaya pemulihan yang berjalan lebih moderat setelah krisis.

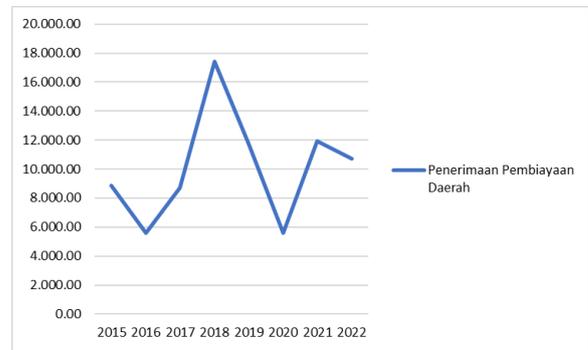
Fenomena ini mencerminkan ketergantungan yang cukup tinggi pada faktor eksternal, seperti kebijakan nasional dan kondisi ekonomi global, yang dapat mempengaruhi penerimaan daerah. Ketidakstabilan ini juga menunjukkan perlunya pengelolaan PAD yang lebih baik dan diversifikasi sumber pendapatan daerah untuk menghadapi fluktuasi yang tidak terduga.



Gambar 3. Belanja Modal Provinsi Jakarta
 Sumber: Satu Data Provinsi Jakarta, 2024

Berdasarkan gambar 3 di atas menunjukkan adanya fluktuasi yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2015, belanja modal mencapai Rp 20.444,02 juta, yang kemudian menurun drastis pada tahun 2016 menjadi Rp 8.965,47 juta. Penurunan ini berlanjut pada tahun 2020, yang tercatat hanya Rp 3.173,22 juta. Penurunan tajam ini kemungkinan disebabkan oleh penghematan anggaran akibat pandemi COVID-19, yang mempengaruhi kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan belanja modal untuk proyek-proyek infrastruktur. Walaupun ada peningkatan di tahun-tahun berikutnya, belanja modal tetap lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun awal, yang menunjukkan adanya keterbatasan anggaran untuk investasi jangka panjang.

Selanjutnya, terkait belanja modal Provinsi Jakarta juga mengalami permasalahan seperti keterbatasan anggaran. Meskipun Jakarta memiliki potensi pendapatan yang besar. Namun masih ada batasan dalam alokasi anggaran untuk investasi jangka panjang seperti pembangunan infrastruktur. Provinsi Jakarta juga mengalami masalah lain seperti ketergantungan pada dana pemerintah pusat atau pinjaman luar negeri untuk mendukung belanja modal. Fluktuasi atau penundaan dalam penyaluran dana dari pemerintah pusat, sehingga mempengaruhi kelancaran pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.



Gambar 4. Penerimaan Pembiayaan Daerah Provinsi Jakarta

Sumber: Satu Data Provinsi Jakarta, 2024

Selain itu, Provinsi Jakarta juga mengalami permasalahan dalam hal penerimaan pembiayaan daerah misalnya adanya permasalahan dalam perpajakan seperti penurunan pendapatan dari pajak dan serta rendahnya kepatuhan terhadap pajak. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap penerimaan pembiayaan daerah karena pajak merupakan sumber utama penerimaan.

Berdasarkan gambar 4 di atas menjelaskan penerimaan pembiayaan yang cenderung fluktuatif. Pada tahun 2015, penerimaan pembiayaan daerah tercatat sebesar Rp 8.843,68 juta, yang kemudian sedikit menurun pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2018, penerimaan pembiayaan daerah meningkat tajam menjadi Rp 17.435,40 juta, mencerminkan adanya perubahan dalam kebijakan atau sumber pembiayaan daerah. Meskipun ada fluktuasi, penerimaan pembiayaan daerah tetap menjadi faktor penting yang membantu menjaga keseimbangan keuangan daerah,

terutama dalam menghadapi defisit anggaran yang dapat terjadi pada beberapa tahun.

Secara keseluruhan, fluktuasi dalam ketiga variabel ini – PAD, belanja modal, dan penerimaan pembiayaan daerah – menunjukkan adanya tantangan dalam pengelolaan keuangan daerah yang harus diatasi. Pemerintah daerah perlu lebih fokus dalam merancang kebijakan yang dapat meningkatkan stabilitas pendapatan, serta memprioritaskan penggunaan anggaran untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan.

Pengeluaran Pemerintah di Jakarta merupakan bagian dari Pengeluaran Pemerintah Indonesia, yang terdiri dari pengeluaran baik dalam ranah politik maupun ekonomi. Pengeluaran Pemerintah masih menjadi pendorong utama ekonomi di Indonesia, yang dipengaruhi oleh pendapatan asli daerah dan pembiayaan. Keuntungan pendapatan daerah diperoleh dari sumber-sumber internal, pendapatan yang diterima dari pemerintah pusat, serta pendapatan lain yang dihasilkan secara lokal semuanya mengalami peningkatan sejalan dengan pertumbuhan yang seimbang dengan dampaknya terhadap belanja modal di Jakarta.

Pengeluaran pemerintah yang cenderung stabil dengan sedikit penurunan juga mencerminkan adanya efisiensi dalam penggunaan anggaran, meskipun sektor-sektor vital tetap mendapat prioritas meskipun ada pembatasan anggaran. Ketidakstabilan yang terjadi pada beberapa variabel ini memperlihatkan pentingnya pengelolaan keuangan yang hati-hati dan pengambilan keputusan yang responsif terhadap perubahan kondisi ekonomi.

Secara keseluruhan, permasalahan yang muncul dalam pengelolaan keuangan daerah ini menyoroti pentingnya diversifikasi sumber pendapatan daerah, pengelolaan anggaran yang fleksibel dan efisien, serta kemampuan pemerintah daerah dalam merencanakan dan menyesuaikan belanja modal dengan kondisi ekonomi yang berkembang. Ke depan, pengelolaan yang lebih transparan dan berbasis data dapat membantu menciptakan stabilitas keuangan

yang lebih baik, yang pada gilirannya akan mendukung pembangunan daerah yang lebih berkelanjutan. Berdasarkan informasi di atas, maka peneliti akan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh PAD, Belanja Modal, dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Terhadap Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jakarta”.

A. Kajian Teori

1. Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah digunakan untuk mendanai berbagai program dan proyek yang bertujuan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi, memperbaiki layanan publik, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini termasuk pengeluaran untuk sektor infrastruktur, kesehatan, pendidikan, subsidi, serta kebijakan sosial lainnya. Ini tercermin dalam dokumen anggaran seperti Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Arfiyansyah, 2018). Meskipun proporsi pengeluaran pemerintah dalam penghitungan pertumbuhan ekonomi relatif kecil, peranannya memiliki dampak strategis secara sosial politis dalam alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Selain itu, pengeluaran pemerintah juga memiliki efek *multiplier* terhadap pertumbuhan ekonomi riil dalam jangka pendek, yang memengaruhi *output* dan tingkat ketenagakerjaan (Samuelson & William, 2001).

Keynes mengembangkan teori pengeluaran pemerintah dalam karyanya yang terkenal, "*The General Theory of Employment, Interest, and Money*" yang dipublikasi pada tahun 1936. Dalam teorinya, Keynes mengungkap bahwa dalam situasi di mana pasar gagal untuk mencapai tingkat penggunaan sumber daya yang optimal dan terjadi tingkat pengangguran yang tinggi, pemerintah harus terlibat dalam mengatur pengeluaran ekonomi untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Pendekatan Keynesian ini menekankan pentingnya intervensi pemerintah melalui kebijakan fiskal (seperti pengeluaran publik dan pajak) untuk merespons kondisi ekonomi yang lesu atau

mengalami resesi. Keynes berpendapat bahwa pemerintah dapat menghasilkan stimulus ekonomi dengan meningkatkan pengeluaran publik, misalnya melalui proyek infrastruktur atau program ketenagakerjaan, yang pada gilirannya dapat memicu peningkatan konsumsi dan investasi swasta.

2. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Elita (2007) merupakan total pendapatan yang berasal dari aktivitas ekonomi yang berada di wilayah daerah tersebut. Pengidentifikasian sumber-sumber PAD melibatkan penelitian, penentuan, dan penegasan terhadap sumber pendapatan yang secara nyata berasal dari wilayah daerah tersebut. Proses ini melibatkan upaya untuk mengelola serta mengoptimalkan penghasilan dari sumber-sumber tersebut dengan tepat dan efektif.

Teori pendapatan asli daerah tidak memiliki satu pencipta tunggal. Namun, teori ini berkembang sebagai hasil dari kontribusi berbagai ekonom dan pakar keuangan yang mempelajari sistem fiskal dan keuangan daerah. Salah satu kontributor penting dalam pengembangan teori ini adalah Richard Musgrave, seorang ekonom Amerika yang dikenal karena karyanya dalam ekonomi publik dan keuangan publik (John Maynard Keynes, 1936).

Teori Pendapatan Asli Daerah (PAD) membahas tentang kemampuan suatu daerah untuk memperoleh pendapatan sendiri melalui sumber daya dan potensi ekonomi lokalnya, tanpa tergantung secara berlebihan pada dana transfer dari pemerintah pusat. Prinsip-prinsip teori ini kemudian digunakan dalam pembentukan kebijakan fiskal daerah untuk memastikan keberlanjutan keuangan daerah serta meningkatkan kemandirian ekonomi lokal.

3. Belanja Modal

Belanja modal menjadi fokus utama dalam pengelolaan keuangan negara karena hal tersebut menunjukkan bagaimana sumber daya keuangan dialokasikan, yang pada akhirnya bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraannya (Tuasikal, 2008). Teori

belanja modal merujuk pada pandangan ekonomi yang menggambarkan bagaimana perusahaan membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya mereka untuk investasi dalam modal fisik seperti mesin, peralatan, dan infrastruktur. Teori ini mencoba menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi keputusan perusahaan dalam hal investasi modal.

Salah satu pencipta teori belanja modal yang paling terkenal adalah John Maynard Keynes. Keynes dikenal karena kontribusinya dalam ekonomi makro, terutama dengan karyanya yang terkenal, "*The General Theory of Employment, Interest, and Money*" (1936). Meskipun Keynes lebih dikenal karena teorinya tentang siklus bisnis dan kebijakan fiskal, dia juga memberikan kontribusi dalam pemahaman investasi modal. Keynes memperkenalkan konsep ekspektasi yang tidak pasti (*uncertain expectations*), di mana ketidakpastian tentang masa depan dapat mempengaruhi keputusan investasi perusahaan.

4. Penerimaan Pembiayaan Daerah

Teori penerimaan pembiayaan daerah adalah konsep dalam ilmu ekonomi dan keuangan publik yang berkaitan dengan cara pemerintah daerah memperoleh dana untuk membiayai kegiatan dan layanan publik mereka. Meskipun tidak ada satu pencipta tunggal untuk teori ini, namun beberapa tokoh ekonomi dan pemikir publik telah memberikan kontribusi penting dalam mengembangkan pemahaman tentang penerimaan pembiayaan daerah.

Salah satu kontributor utama dalam hal ini adalah Wallace E. Oates, seorang ekonom Amerika yang dikenal karena karyanya dalam bidang keuangan publik, termasuk keuangan daerah. Oates mengembangkan konsep "*federalism fiscal*", yang menyoroti pentingnya otonomi fiskal bagi pemerintah daerah untuk memungkinkan mereka membuat keputusan ekonomis yang lebih efisien sesuai dengan kebutuhan lokal mereka (Walinono, 2022).

Selain Oates, beberapa ekonom lainnya seperti Richard Musgrave dan Charles Tiebout juga memberikan pemikiran yang berpengaruh dalam pengembangan teori

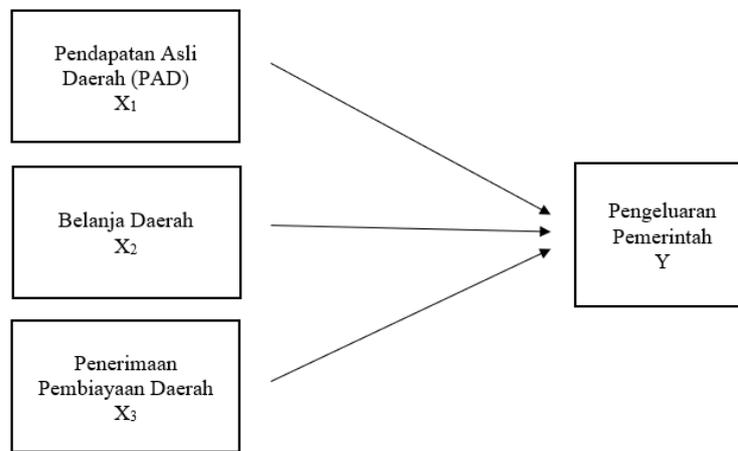
penerimaan pembiayaan daerah. Musgrave, misalnya, dikenal karena konsepnya tentang fungsi-fungsi fiskal pemerintah, termasuk fungsi alokatif, distributif, dan stabilisasi. Sementara itu, Tiebout mengemukakan Teori Lokasi yang menyatakan bahwa warga memilih tempat tinggal mereka berdasarkan pada kombinasi harga dan layanan publik yang mereka terima dari pemerintah daerah (Tiebout, 2008).

Secara umum, teori penerimaan pembiayaan daerah menggabungkan berbagai konsep ekonomi dan keuangan publik untuk memahami cara pemerintah

daerah memperoleh pendapatan, termasuk pajak, transfer dari pemerintah pusat, utang, dan sumber pendapatan lainnya. Teori ini membantu merancang kebijakan fiskal yang lebih efektif dan efisien bagi pemerintah daerah, serta memahami dampak kebijakan tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat lokal.

B. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan dasar teori di atas dan studi terdahulu, kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dijelaskan secara sistematis sebagai berikut:



Gambar 5. Kerangka Penelitian
 Sumber: Dibuat Penulis, 2024

II. METODE PENELITIAN

Penelitian mengenai Analisis Pengaruh PAD, Belanja Modal, dan Penerimaan Pembiayaan Daerah ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang sedang diteliti.

Penelitian ini menggunakan data kuantitatif yang dianalisis dengan menggunakan regresi berganda. Data kuantitatif merupakan data yang diukur ke dalam skala numerik (angka). Data yang digunakan ialah data *time series* tahun 2015-2022 yang bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Jakarta.

Sebelum analisis statistik dilakukan terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik, yang meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji

heteroskedastisitas. Uji normalitas mempunyai kegunaan pada pengujian apakah model regresi, variabel dependen, serta variabel independen terdistribusi dengan normal maupun tidak. Uji multikolinearitas yakni keadaan terdapatnya hubungan variabel bebas atau variabel satu bersama variabel yang lain, maka variabel bebas tersebut dihapuskan. Uji autokorelasi dipakai guna mengamati apakah variabel gangguan dalam suatu masa berkaitan bersama variabel gangguan dalam masa lainnya. Sedangkan uji heteroskedastisitas memiliki tujuan dalam pengujian variabel gangguan tidak memiliki varian yang sebanding bagi seluruh observasi. Di mana perhitungan data dengan menggunakan metode regresi linear berganda menggunakan persamaan:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

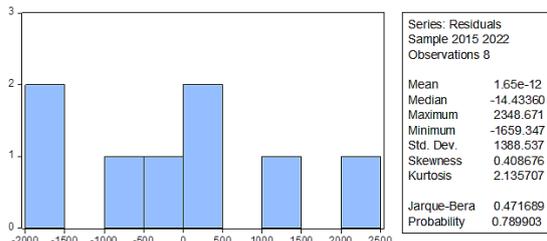
- Y = Pengeluaran Pemerintah
- α = Konstanta
- X1 = Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- X2 = Belanja Daerah
- X3 = Penerimaan Pembiayaan Daerah
- β = Pengeluaran Pemerintah
- ϵ = Error

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil

1. Uji Asumsi Klasik

a) Uji Normalitas



Gambar 6. Uji Normalitas

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Nilai *Jarque-Bera* adalah 0,471689 dan probabilitas yang sesuai adalah 0,789903. Nilai probabilitas hasil pengujian yang tidak lebih kecil dari 0,05 ($\alpha=5\%$) menunjukkan bahwa data tersebut terdistribusi secara normal.

b) Uji Multikolinearitas

Tabel 1. Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	6768666,	16,04872	NA
X1	0,005199	14,73490	1,330928
X2	0,028862	15,36470	1,491758
X3	0,041879	15,11628	1,818400

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Jika nilai VIF setiap variabel bebas kurang dari 10, maka model itu terbebas dari masalah multikolinearitas yang serius. Dalam tabel di atas, nilai VIF pada setiap variabel independen kurang dari 10, sehingga dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini tidak mengalami masalah multikolinearitas yang serius.

c) Uji Autokorelasi

Tabel 2. Uji Autokorelasi

<i>F</i> -statistic	0,272292	Prob. <i>F</i> (2,2)	0,7860
<i>Obs</i> * <i>R</i> -squared	1,712135	Prob. <i>Chi</i> -Squared(2)	0,4248

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan hasil uji autokorelasi, nilai probabilitas *Chi-square* sebesar 0,4248 lebih besar dari taraf signifikansi 0,05, yang berarti tidak ada masalah dalam autokorelasi.

d) Uji Heteroskedastisitas

Tabel 3. Uji Heteroskedastisitas

<i>F</i> -statistic	0,308839	Prob. <i>F</i> (3,2)	0,8191
<i>Obs</i> * <i>R</i> -squared	1,504541	Prob. <i>Chi</i> -Squared(3)	0,6812
Scaled explained SS	0,740501	Prob. <i>Chi</i> -Squared(3)	0,8636

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Hasil dari *Resabs* variabel dapat digunakan untuk menguji heteroskedastisitas. Hasil probabilitas *chi-square* pada tingkat signifikansi 0,05 ($\alpha=5\%$) menunjukkan bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas apabila nilai probabilitas *chi-square* lebih besar dari 0,05. Sedangkan jika nilai variabel kurang dari 0,05 maka ada masalah heteroskedastisitas.

Hasil pengujian heteroskedastisitas dengan uji *Breusch-Pagan-Godfrey* di atas menunjukkan bahwa tidak ada masalah, karena probabilitas dari masing-masing variabel independen lebih dari 5%. Model regresi yang digunakan dalam penelitian tersebut tidak menunjukkan masalah heteroskedastisitas.

2. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan pengujian yang dilakukan pada uji asumsi klasik menunjukkan bahwa model bebas dari permasalahan asumsi klasik sehingga memungkinkan dilakukan analisis statistik dan pengujian hipotesis. Berdasarkan analisis statistik diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Penerimaan Pembiayaan Daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah di Provinsi Jakarta yang ditunjukkan dengan hasil *F* pada tabel di bawah ini :

Tabel 4. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
C	4618,154	1,775076	0,1505
X1	0,101022	1,401090	0,0337
X2	0,107107	0,630455	0,0463
X3	-0,237359	-1,159860	0,0310
<i>R</i> -squared			0,038127
Adjusted <i>R</i> -squared			0,081945
<i>F</i> -statistic			0,042326
Prob(<i>F</i> -statistic)			0,045465

Sumber: Hasil Olah Data, 2024

Berdasarkan hasil regresi di atas, didapatkan probabilitas uji F sebesar 0,045465 kurang dari taraf signifikansi $\alpha=5\%$. Hal ini menunjukkan bahwa H_0 ditolak yang berarti bahwa secara bersama-sama Pendapatan Asli Daerah (X_1), Belanja Modal (X_2), dan Penerimaan Pembiayaan Daerah (X_3) berpengaruh signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah (Y).

Hasil analisis statistik lanjutan menunjukkan bahwa secara parsial (uji t) Pendapatan Asli Daerah (X_1) berpengaruh positif signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah (Y) Provinsi Jakarta dengan melihat nilai probabilitas $0,0337 < \alpha = 0,05$ pada tingkat signifikansi 5%. Kemudian, hasil analisis statistik menunjukkan bahwa secara parsial Belanja Modal (X_2) berpengaruh positif signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah (Y) Provinsi Jakarta dengan melihat nilai probabilitas $0,0463 < \alpha = 0,05$ pada tingkat signifikansi 5%. Hal tersebut juga terjadi pada variabel Penerimaan Pembiayaan Daerah (X_3) yang berpengaruh negatif signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah (Y) Provinsi Jakarta dengan melihat nilai probabilitas $0,0310 < \alpha = 0,05$ pada tingkat signifikansi 5%.

Kemudian, dengan koefisien determinan *adjusted R-square* sebesar 0,081945, dapat ditarik kesimpulan bahwa dampak dari semua variabel independen yakni, Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Penerimaan Pembiayaan Daerah terhadap perubahan nilai variabel dependen yaitu Pengeluaran Pemerintah adalah sebesar 8,19% sedangkan sisanya yaitu 91,81% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam

penelitian ini. Berdasarkan perhitungan pada tabel 4 diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 4618,154 + 0,101022X_1 + 0,107107X_2 - 0,237359X_3 + \varepsilon$$

B. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jakarta

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa faktor Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki pengaruh positif signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah (Y) Provinsi Jakarta dengan nilai probabilitas $0,0337 < \alpha = 0,05$ pada tingkat signifikansi 5%. Hal ini menandakan bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan mengakibatkan peningkatan Pengeluaran Pemerintah. Misalnya, peningkatan PAD bisa mengarah pada peningkatan alokasi dana untuk pembangunan infrastruktur atau penyediaan layanan publik di wilayah Jakarta.

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa PAD dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah dengan nilai koefisien untuk PAD sebesar 0,101022. Artinya, setiap peningkatan PAD sebesar 1 milyar rupiah dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah sebesar 0,01 milyar rupiah. Hal ini sejalan dengan temuan yang telah ditemukan dalam penelitian sebelumnya oleh Muhammad Risky Dwi Aditya, Zamruddin Hasid, dan Akhmad Noor (2021) yang menunjukkan bahwa PAD ada pengaruh positif dan signifikan terhadap pengeluaran pemerintah.

2. Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jakarta

Hasil analisis juga menunjukkan bahwa belanja modal mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap pengeluaran pemerintah dengan nilai probabilitas $0,0463 < \alpha = 0,05$ pada tingkat signifikansi 5%. Ini menandakan bahwa meningkatnya belanja modal juga akan berkontribusi pada peningkatan pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh, peningkatan belanja untuk pembelian aset tetap seperti infrastruktur jangka panjang dapat meningkatkan total pengeluaran pemerintah.

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa belanja modal dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah dengan nilai

koefisien untuk belanja modal sebesar 0,107107. Artinya, setiap peningkatan belanja modal sebesar 1 milyar rupiah dapat meningkatkan pengeluaran pemerintah sebesar 0.01 milyar rupiah. Hal ini didukung dengan adanya penelitian terdahulu oleh Fitriani, Dahliah Baharuddin, Hukma Ratu Purnama, dan Mappaujung Maknun (2023) yang menyelidiki hubungan antara belanja modal dan Pengeluaran pemerintah di kabupaten Maros dari tahun 2017 hingga 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peningkatan signifikan dalam Belanja Modal selama periode tersebut, yang terlihat dari adanya pembangunan infrastruktur seperti pasar tradisional, perbaikan jalan, dan pengembangan akses transportasi. Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa pengujian hipotesis menolak hipotesis alternatif yang mengungkapkan bahwa Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Pengeluaran Pemerintah. Kemungkinan besar disebabkan oleh rentang waktu yang diperlukan untuk hasil pembangunan infrastruktur tersebut dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, sehingga dampaknya terhadap Pengeluaran Pemerintah belum dapat terlihat secara langsung.

3. Pengaruh Penerimaan Pembiayaan Daerah Terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jakarta

Hasil analisis memperlihatkan bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah dengan nilai probabilitas $0,0310 < \alpha = 0,05$ pada tingkat signifikansi 5%. Ini berarti bahwa peningkatan penerimaan pembiayaan daerah, seperti utang atau pinjaman, dapat mengakibatkan penurunan Pengeluaran Pemerintah karena harus dialokasikan untuk pembayaran utang atau bunga utang.

Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa penerimaan pembiayaan daerah dapat menurunkan pengeluaran pemerintah dengan nilai koefisien untuk penerimaan pembiayaan daerah sebesar -0,237359. Artinya, setiap peningkatan penerimaan pembiayaan daerah sebesar 1 milyar rupiah dapat menurunkan pengeluaran pemerintah sebesar 0,23 milyar

rupiah. Penelitian terdahulu yang sejalan dengan hasil pembahasan di atas menunjukkan bahwa penerimaan pembiayaan daerah, seperti utang atau pinjaman, dapat berdampak negatif terhadap pengeluaran pemerintah. Misalnya, penelitian yang dilakukan oleh Devi Reza (2023) menunjukkan bahwa penerimaan dan pengeluaran pemerintah mengalami perubahan signifikan selama periode 2019-2021, terutama akibat dampak pandemi COVID-19. Penelitian ini menemukan bahwa peningkatan penerimaan pembiayaan daerah sering kali diikuti oleh penurunan pengeluaran pemerintah karena dana harus dialokasikan untuk pembayaran utang atau bunga utang.

Selain itu, penelitian oleh Kusriyawanto (2019) juga menemukan bahwa penerimaan pembiayaan daerah memiliki pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi provinsi di Indonesia sebelum dan sesudah otonomi daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa setelah otonomi daerah, penerimaan pembiayaan daerah cenderung menurunkan pertumbuhan ekonomi karena dana yang diterima harus digunakan untuk membayar utang, sehingga mengurangi alokasi untuk pengeluaran pemerintah yang produktif.

Penelitian lain oleh Fitri Angreini (2021) juga mendukung temuan ini, di mana mereka menemukan bahwa penerimaan pembiayaan daerah tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap belanja modal kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pembiayaan daerah tidak selalu berdampak positif pada pengeluaran pemerintah, terutama jika dana tersebut harus digunakan untuk membayar utang atau bunga utang.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan pembiayaan daerah dapat mengakibatkan penurunan pengeluaran pemerintah karena dana harus dialokasikan untuk pembayaran utang atau bunga utang, yang sejalan dengan hasil analisis.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan analisis data *time-series* dari tahun 2015 hingga 2022 di Provinsi Jakarta, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan belanja modal memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jakarta. Sebaliknya, Penerimaan Pembiayaan Daerah menunjukkan pengaruh negatif yang signifikan terhadap pengeluaran tersebut.

Dapat dilihat dari beberapa fenomena dan penelitian terdahulu yang mendukung temuan ini. Penelitian yang dilakukan oleh Mardiasmo (2009) menunjukkan bahwa PAD yang tinggi memungkinkan pemerintah daerah untuk meningkatkan belanja modal, yang pada gilirannya meningkatkan pengeluaran pemerintah secara keseluruhan. Selain itu, studi oleh Halim (2012) mengungkapkan bahwa belanja modal yang efektif dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, yang kemudian meningkatkan pengeluaran pemerintah.

Di sisi lain, penelitian oleh Suparmoko (2010) menemukan bahwa ketergantungan pada penerimaan pembiayaan daerah dapat mengurangi efisiensi pengeluaran pemerintah, karena dana yang diperoleh dari pembiayaan sering kali digunakan untuk menutupi defisit anggaran daripada untuk investasi produktif. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa Penerimaan Pembiayaan Daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap Pengeluaran Pemerintah Provinsi Jakarta.

Dengan demikian, hasil analisis ini konsisten dengan fenomena dan penelitian terdahulu, yang menunjukkan bahwa PAD dan belanja modal berperan penting dalam meningkatkan pengeluaran pemerintah, sementara ketergantungan pada penerimaan pembiayaan daerah dapat berdampak negatif terhadap efisiensi pengeluaran.

V. SARAN/REKOMENDASI

Berdasarkan hasil studi mengenai dampak Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pengeluaran Modal, dan Penerimaan Pembiayaan Daerah terhadap Pengeluaran Pemerintah di wilayah Jakarta, beberapa saran dapat diajukan untuk pemerintah dan penelitian lebih lanjut. Untuk

pemerintah, disarankan meningkatkan pendapatan lokal dengan memaksimalkan pemanfaatan potensi pajak daerah, mengembangkan sektor-sektor unggulan, dan memperkuat pengelolaan PAD secara efisien. Selain itu, pemerintah perlu memaksimalkan penggunaan belanja modal dengan memprioritaskan proyek-proyek yang memiliki dampak jangka panjang dan memperkuat sistem perencanaan serta pengawasan proyek. Di samping itu, dalam meminjam dana, pemerintah sebaiknya membatasi penggunaan dana pinjaman untuk proyek-proyek produktif dan meningkatkan transparansi dalam pengelolaan dana pinjaman. Sinergi yang efektif antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga perlu ditingkatkan untuk memperkuat sinergi dalam pembangunan daerah.

Sementara itu, untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih dalam faktor-faktor lain yang dapat berdampak pada pengeluaran pemerintah di Provinsi Jakarta perlu diperhatikan. Penelitian tersebut juga dapat melibatkan daerah lain guna memahami generalisasi hasil penelitian ini. Metodologi penelitian yang berbeda juga dapat digunakan untuk memperkuat hasil penelitian ini. Dengan menerapkan saran-saran tersebut, diharapkan pemerintah dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengeluaran pemerintah serta meningkatkan kualitas pembangunan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan berharga bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD), Belanja Modal, dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, serta memberikan nilai tambah bagi studi-studi lain yang tertarik untuk mengeksplorasi topik yang serupa.

VI. REFERENSI

Aditya, M. R. D., Hasid, Z., & Noor, A. (2021). Pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Ilmu Ekonomi Mulawarman (JIEM)*, Vol 6, No(4), 3–4.

- Angreini, F., Kartika, R., & Sari, Y. D. (2021). Pengaruh Pendapatan Daerah dan Pembiayaan terhadap Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan. *Indonesian Journal of Applied Accounting and Finance*, 1(2), 73–86.
- Arfiyansyah, S. (2018). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Melalui Pendapatan Domestik Regional Bruto di Indonesia. *Indonesian Treasury Review*, 3(4), 270–283. <https://doi.org/10.33105/itrev.v3i4.77>
- Elita. (2007). *Penerimaan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah*. Rajawali.
- Fitriani, Baharuddin, D., Purnama, H. R., & Maknun, M. (2023). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Belanja Modal Terhadap Pengeluaran Pemerintah. *Center of Economic Student Journal*, 6(1), 2621–8186. <https://doi.org/10.33096/csej.v6i1.573>
- Halim, & Kusufi. (2012). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*.
- John Maynard Keynes. (1936). *The General Theory of Employment, Interest and Money*. London.
- Kusriyawanto. (2019). Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Penerimaan Pajak Provinsi- Provinsi Di Indonesia Sebelum Dan Sesudah Otonomi Daerah Tahun 1994-2010. *E-Jurnal Katalogis*, 2(Juli 2014), 102. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/6004>
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Publik*.
- Reza, D., Ramadhani, D., Mahfudzoh, N., Ramadhani, D. K., & Fitri, V. (2023). Analisis Penerimaan dan Pengeluaran Negara Indonesia Tahun 2019-2021. *Journal Of Economic Education*, 2(1), 1–15.
- Sukirno, S. (2010). *Mikro ekonomi teori pengantar*. Edisi Ketiga PT. RajaGrafindo.
- Samuelson, P. A., & William, D. N. (2001). *Ilmu Mikroekonomi* (17th ed.). PT Media Global Edukasi.
- Suparmoko, M. (2010). *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan: Suatu Pendekatan Teoritis*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomika.
- Tiebout, C. M. (2008). A PURE THEORY OF LOCAL EXPENDITURES. *Northwestern University NE*, 64(4), 416–424.
- Tuasikal, A. (2008). Pengaruh DAU, DAK, PAD, DAN PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 1(2), 142–155.
- Walinono, A. M. I. (2022). Analisis Determinan Tingkat Kemiskinan Di Indonesia. *JIEP: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Pembangunan*, 2(1), 76. <https://doi.org/10.20527/jiep.v2i1.1156>